

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Entitas Berorientasi Non Laba (EBNL) merupakan entitas yang menjalankan aktivitas yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba dan memperoleh sumber daya dari para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan ekonomis secara langsung (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Aktivitas operasional entitas nonlaba berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan bertanggung jawab (Assoba & Uzliawati, 2023). Dalam praktiknya, kas dan aset tetap merupakan komponen utama yang mendukung kelangsungan kegiatan organisasi nonlaba, sehingga pengelolaan kedua unsur tersebut memerlukan sistem pencatatan dan pengendalian yang tertib (Rahayu & Pustikaningsih, 2019). Oleh karena itu, keberadaan sistem pengelolaan kas dan pengendalian aset tetap yang sistematis menjadi kebutuhan penting bagi entitas nonlaba dalam mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan operasional organisasi.

Entitas berorientasi nonlaba (EBNL) mencakup berbagai bidang kegiatan, seperti sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan, yang seluruhnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, bukan pada perolehan keuntungan (Persada et al., 2025). Salah satu bentuk EBNL dalam

bidang keagamaan adalah pura, yang dalam praktiknya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu. Selain sebagai tempat ibadah, pura juga berperan sebagai ruang pendidikan agama, aktivitas sosial-budaya, dan penguatan solidaritas komunitas Hindu (Sari, 2025). Dengan fungsi yang demikian, pura tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pura mengelola dana punia dan berbagai penerimaan lain yang disalurkan umat dalam bentuk sumbangan keagamaan, iuran pelaksanaan upacara, donasi pembangunan, serta kontribusi sukarela untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan keagamaan, sehingga diperlukan pengelolaan kas yang terstruktur kepada pihak yang berkepentingan (Sujaelanto, 2023). Selain itu, administrasi aset pada pura perlu diperkuat melalui pendataan yang memadai, karena aset pura tidak hanya diperoleh melalui pembelian, tetapi juga dapat berasal dari hibah, sumbangan, dan penyerahan barang dari umat untuk menunjang kegiatan keagamaan (Sujaelanto, 2023). Oleh karena itu, pengendalian aset menjadi penting agar setiap aset yang dimiliki pura dapat diketahui keberadaan, kondisi, nilai, dan penggunaannya secara jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan (Insani et al., 2025). Dengan demikian, pengelolaan kas dan pendataan aset yang tertib merupakan bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan sumber daya pada pura.

Pentingnya pengelolaan kas pada pura terlihat ketika penerimaan dan pengeluaran dana tidak didukung oleh pencatatan yang tertib, bukti transaksi

yang memadai, serta otorisasi yang jelas. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa di Gianyar yang diungkap pada 23 November 2024, ketika pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menemukan nota fiktif, mark up harga, nota ganda, dan pembelian barang di luar RAB (Tim detikBali, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada pura tidak dapat hanya bertumpu pada kepercayaan, tetapi harus didukung oleh bukti transaksi yang sah, pemisahan fungsi, dan pengawasan yang memadai agar setiap arus kas dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selain kas, pengendalian aset tetap pada pura juga perlu diperkuat melalui pendataan yang sistematis agar status, keberadaan, dan penggunaan aset dapat diketahui secara jelas. Urgensi penatausahaan aset tersebut tampak dari berbagai kasus sengketa aset pura, seperti polemik lahan Pura Dalem Balangan di Jimbaran dan sengketa tanah Pura Taman Kemuda Saraswati di Ubud, yang menunjukkan bahwa aset pura dapat menghadapi persoalan hukum ketika bukti perolehan, status administrasi, dan pencatatannya tidak tertata dengan baik (Putri, 2026; Ridwan, 2025). Oleh karena itu, kartu aset tetap menjadi penting karena dapat memuat identitas, asal perolehan, nilai, lokasi, kondisi, dan mutasi aset secara sistematis, sehingga keberadaan dan penggunaan aset dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Dengan demikian, kartu aset tetap tidak hanya berfungsi sebagai dokumen inventarisasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal

untuk mencegah ketidakjelasan status, kehilangan informasi aset, dan potensi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan berbagai kasus pengelolaan kas dan pengendalian aset, terlihat bahwa peningkatan tata kelola keuangan dan aset pada pura merupakan kebutuhan yang mendesak. Pada tingkat daerah, jumlah umat Hindu di Jawa Barat meningkat dari 17.356 jiwa pada 2023 menjadi 17.413 jiwa pada 2024, atau bertambah 57 jiwa dalam satu tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Dalam konteks Jawa Barat, Kota Bekasi juga menonjol karena pada 2023 memiliki 4.077 umat Hindu, lebih tinggi dibanding Kabupaten Bekasi yang berjumlah 1.881 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Peningkatan jumlah umat Hindu tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengelolaan kas dan aset pura juga semakin penting. Oleh karena itu, Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi menjadi objek proyek yang relevan, sehingga perancangan Kuitansi, *Payment voucher*, buku kas, dan kartu aset tetap diperlukan untuk mendukung administrasi yang lebih tertib, terstruktur, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi, diketahui bahwa pencatatan kas masuk dan kas keluar masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan format yang baku, sehingga informasi mengenai transaksi dan saldo kas belum tersaji secara sistematis serta sulit ditelusuri kembali. Selain itu, pendataan aset tetap belum terdokumentasi secara lengkap dalam bentuk kartu aset tetap yang terstruktur,

sehingga informasi mengenai jumlah dan lokasi aset belum dapat dipantau secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan pengelolaan kas dan pengendalian aset tetap secara efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya alat bantu administrasi yang sederhana, terstandar, dan mudah dioperasikan oleh pengelola pura. Penelitian pada Pura Girinatha Gorontalo menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi, sehingga dibutuhkan media kerja yang lebih praktis untuk mendukung ketertiban administrasi (Ikayani et al., 2023). Dalam konteks tersebut, Microsoft Excel relevan digunakan karena mendukung pencatatan data, perhitungan otomatis, pengelompokan informasi, dan validasi input, sehingga format administrasi dapat disusun lebih rapi dan mudah diperbarui. Melalui pemanfaatan Microsoft Excel, pengelolaan kas dapat didukung melalui perancangan Kuitansi, *Payment voucher*, dan buku kas, sedangkan pengendalian aset tetap dapat didukung melalui penyusunan kartu aset tetap yang sistematis.

Dalam proyek ini, *Payment voucher* dan Kuitansi merupakan instrumen administrasi kas yang penting untuk mendukung tertib pengelolaan keuangan pada pura. *Payment voucher* berfungsi sebagai dokumen otorisasi pengeluaran kas dan dasar pencatatan transaksi (Dewi, 2017). Kebutuhan dokumen ini relevan karena pengeluaran kas pada pura mencakup berbagai kebutuhan operasional dan ritual, sehingga harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik (Putra & Sumadi, 2021). Sementara itu, Kuitansi berfungsi sebagai bukti transaksi awal yang mendukung pencatatan kas secara tertib, sebagaimana terlihat pada pengelolaan Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin (Nhingswari et al., 2019). Dengan demikian, *Payment voucher* dan Kuitansi tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pendukung akuntabilitas transaksi kas pada pura (Aryasita, 2021).

Selanjutnya, buku kas merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan pada pura karena berfungsi mencatat kas masuk, kas keluar, dan saldo secara kronologis. Penelitian pada Tanah Druwe Pura Desa Pakraman Bebetin menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan menghadapi kendala berupa pencatatan yang kurang jelas serta kesalahan hitung (Nhingswari et al., 2019). Oleh karena itu, buku kas pada pura perlu disusun secara sistematis dengan memuat tanggal, uraian transaksi, nomor bukti, dan saldo berjalan agar setiap transaksi dapat ditelusuri kembali. Dalam hal ini, Microsoft Excel relevan digunakan karena dapat mendukung pembukuan dan kas kecil secara lebih terstruktur sehingga administrasi menjadi lebih rapi dan efisien (Rejeki et al., 2024).

Selain pengelolaan kas, kartu aset tetap merupakan instrumen penting dalam mendukung pengendalian aset pada pura. Kajian pada pengelolaan Tanah Druwe Pura menunjukkan bahwa pencatatan merupakan aspek mendasar dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan pura (Nhingswari et al., 2019). Di sisi lain, kajian pada yayasan keagamaan menunjukkan bahwa

ketiadaan daftar aset tetap yang terdokumentasi dan diperbarui secara rutin dapat menyebabkan informasi aset menjadi tidak akurat atau ketinggalan zaman (Wijaya, 2026). Oleh karena itu, kartu aset tetap perlu memuat identitas, asal perolehan, lokasi, kondisi, dan mutasi aset agar pengawasan serta pertanggungjawaban aset pada pura dapat dilakukan secara lebih tertib (Anugrah et al., 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas dan pengendalian aset tetap pada pura merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya, terutama karena aktivitas operasional pura melibatkan berbagai penerimaan, pengeluaran, dan aset yang perlu dicatat serta diawasi secara tertib. Kondisi di Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi menunjukkan bahwa sistem administrasi yang masih sederhana belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan pencatatan kas dan pendataan aset secara sistematis, sehingga diperlukan alat bantu yang praktis, mudah digunakan, dan sesuai dengan kemampuan pengelola. Dalam hal ini, Microsoft Excel dinilai relevan untuk dimanfaatkan sebagai media perancangan *Payment voucher*, Kuitansi, buku kas, dan kartu aset tetap karena mampu mendukung penyusunan administrasi yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah diperbarui. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan solusi yang telah diidentifikasi, proyek ini dirumuskan dengan judul “Perancangan Sistem Akuntansi Kas dan Pengendalian Aset Tetap Berbasis Microsoft Excel pada Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi”.

B. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan pada proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi administrasi yang ada dengan kondisi yang diharapkan, yaitu tersedianya sistem pencatatan kas dan pengendalian aset tetap yang lebih tertib, sistematis, dan mudah digunakan pada Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi. Analisis kebutuhan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pengurus, serta telaah dokumen administrasi milik Pura. Kebutuhan proyek ini meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Kebutuhan Pengelolaan Kas

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas masih belum terdokumentasi secara optimal, sehingga menyulitkan penelusuran transaksi, pemantauan saldo, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, bukti transaksi juga belum tersusun secara standar sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kehilangan informasi transaksi.

Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya dokumen dan catatan kas yang tertib, sistematis, dan mudah ditelusuri. Sehingga diperlukan beberapa dokumen pendukung pengelolaan kas, meliputi: (a) *Payment voucher* sebagai bukti transaksi pengeluaran kas; (b) Kuitansi sebagai bukti penerimaan kas; dan (c) Buku Kas sebagai media pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar. Ketersediaan dokumen ini diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kas pada Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi.

2. Kebutuhan Pengendalian Aset Tetap

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa aset dan inventaris yang dimiliki Pura belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan pemantauan lokasi penyimpanan, kondisi aset, serta penanggung jawab pengguna aset. Selain itu, pencatatan aset yang ada belum memuat informasi akuntansi yang lengkap seperti harga perolehan aset, tanggal perolehan, serta nilai penyusutan aset, sehingga informasi mengenai nilai aset belum dapat diketahui secara akurat.

Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya pencatatan aset tetap yang terstruktur dan mudah diperbarui, sehingga diperlukan media pencatatan berupa Kartu Aset Tetap yang memuat: (a) Identitas aset (nama aset, tanggal perolehan, dan jenis aset); (b) Informasi akuntansi aset (harga perolehan, umur manfaat aset, metode dan nilai penyusutan setiap periode, nilai buku, serta nilai residu); (c) Lokasi penyimpanan aset; dan (d) Penanggung jawab aset. Keberadaan media pencatatan ini diharapkan dapat mendukung proses pengendalian aset lebih efektif dan memudahkan pengawasan keberadaan aset.

3. Kebutuhan Penggunaan Microsoft Excel

Kondisi saat ini menunjukkan perlunya media pencatatan yang mudah digunakan, praktis, serta sesuai dengan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem administrasi. Media pencatatan yang digunakan sebelumnya belum mampu mendukung proses pengelompokan data, perhitungan otomatis, serta penyusunan laporan secara sistematis.

Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya sistem sederhana berbasis Microsoft Excel yang mampu mendukung pencatatan transaksi kas dan pendataan aset secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, Microsoft Excel dipilih sebagai media pengembangan sistem karena memiliki berbagai fitur yang mendukung kebutuhan administrasi Pura, yang meliputi: (a) Perhitungan otomatis menggunakan formula; (b) Validasi data untuk mengurangi kesalahan *input*; (c) Pengelompokan data secara sistematis; (d) Penyusunan laporan kas secara otomatis; (e) Penyimpanan data yang mudah diperbarui; dan (f) Perhitungan otomatis nilai penyusutan aset tetap berdasarkan metode penyusutan yang digunakan.

Penggunaan Microsoft Excel diharapkan dapat mengintegrasikan data transaksi kas dan data aset tetap dalam satu *workbook* sehingga memudahkan pengelolaan dan penelusuran informasi secara menyeluruh.

4. Kebutuhan *User Manual*

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem administrasi berpotensi menimbulkan kesalahan apabila tidak disertai dengan petunjuk penggunaan sistem yang jelas. Penggunaan sistem memerlukan panduan yang mudah dipahami agar sistem dapat digunakan secara konsisten dan benar. Selain itu, adanya panduan (*user manual*) dapat membantu Pura bila terjadi pergantian kepengurusan.

Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya *user manual* sebagai pedoman penggunaan sistem yang memuat langkah-langkah pengoperasian sistem berbasis Microsoft Excel tersebut secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan *user manual* yang berisi: (a) Penjelasan fungsi setiap menu atau lembar kerja; (b) Langkah-langkah penggunaan sistem; (c) Contoh pengisian data; dan (d) Petunjuk penyimpanan dan pemeliharaan data. *User Manual* ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan penggunaan sistem serta mendukung keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang.

C. Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah merancang sistem pengelolaan kas dan pengendalian aset tetap berbasis Microsoft Excel pada Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi, sehingga pengelolaan kas dan aset tetap dapat dilakukan secara lebih tertib, sistematis, terstruktur, dan mudah dipertanggungjawabkan. Selain itu, proyek ini bertujuan menyediakan alat bantu administrasi yang praktis dan mudah digunakan oleh pengurus dalam mencatat transaksi kas serta mengendalikan aset tetap secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan proyek ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada Pura, meliputi:

1. Merancang sistem pencatatan kas berbasis Microsoft Excel yang mencakup dokumen transaksi berupa *Payment voucher* dan Kuitansi, serta buku kas sebagai media pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar secara sistematis dan terstruktur.

2. Merancang sistem pencatatan dan pengendalian aset tetap berbasis Microsoft Excel dalam bentuk kartu aset tetap yang memuat informasi administratif dan informasi akuntansi aset tetap, meliputi identitas aset, tanggal dan harga perolehan aset, umur manfaat, metode penyusutan, nilai penyusutan, nilai buku aset, lokasi penyimpanan, serta penanggung jawab aset guna mendukung proses pemantauan dan pengendalian aset secara lebih efektif.
3. Mengembangkan sistem administrasi kas dan aset tetap dalam bentuk *workbook* Microsoft Excel yang terintegrasi, sehingga proses pencatatan, pengolahan data, dan penyusunan informasi kas dan aset tetap dapat dilakukan secara lebih efisien, sistematis, dan mudah diperbarui.
4. Menyusun *user manual* sebagai pedoman penggunaan sistem berbasis Microsoft Excel, yang memuat langkah-langkah penggunaan sistem, contoh pengisian data, serta petunjuk pemeliharaan data agar sistem dapat digunakan secara benar, konsisten, dan berkelanjutan.